

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembangunan suatu wilayah untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang diinginkan, masalah pembangunan merupakan masalah utama. Di awal kebijakan setiap negara menghadapi masalah utama yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bukan hanya fenomena ekonomi; tujuan utamanya adalah pemerataan ekonomi, karena mewujudkan pemerataan ekonomi tanpa melalui upaya pembangunan ekonomi menjadi tugas yang sulit dilaksanakan. Menurut (Hidayat, 2017) menyatakan bahwa permasalahan pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, kelembagaan, dan lainnya. Dalam penyelesaian masalah ini, aspek utama pembangunan dan pertumbuhan adalah persamaan tentang bagaimana aktivitas ekonomi berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, lingkungan, dan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Seringkali, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator kemajuan ekonomi. Namun, di beberapa tempat, masih ada konfrontasi antara fokus pada pertumbuhan ekonomi guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan menangani isu kemiskinan.

Hingga saat ini, fokus utama tetap pada upaya meningkatkan perekonomian guna mencapai pendapatan yang lebih baik. Tingkat kemajuan dalam usaha meningkatkan perekonomian dapat dinilai berdasarkan perkembangan dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Menurut (Arif & Wicaksani, 2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting yang menunjukkan penerimaan PDRB seluruh negara. Dengan mempertimbangkan keanekaragaman

sumber daya alam dan lokasi geografis Indonesia, setiap daerah dapat menjadi lebih selamat dan aman. Oleh sebab itu, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang mencolok, pendekatan klasifikasi diterapkan untuk menggabungkan potensi sumber daya yang tersedia dan karakteristik unik dari setiap daerah..

Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan mekanisme perubahan, terutama di bidang ekonomi, adalah pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan stabilitas masyarakat dan membuat pemerintah menjadi lebih efisien di masa mendatang. Peningkatan pendapatan jangka panjang dapat terjadi melalui proses pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang pada gilirannya mengakibatkan perubahan dalam aspek pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak selalu menghasilkan hasil pembangunan yang baik, karena pertumbuhan yang baik akan mempengaruhi kesenjangan dan distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang baik tidak selalu diikuti dengan stabilitas. Pemerataan ekonomi bertujuan untuk mengatur proses pertumbuhan ekonomi agar disparitas pendapatan dapat dikurangi, terutama dalam situasi di mana suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat yang kemudian diikuti oleh penurunan pendapatan. Dalam pembangunan ekonomi setiap wilayah, ada perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang dapat menyebabkan disparitas pendapatan. Pemerintah juga harus memperhatikan seluruh daerah tanpa pengecualian. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan bermanfaat bagi semua orang secara merata. (Ningtiyas & Nuraini Dwiputri, 2021) menyatakan Salah satu komponen yang memastikan bahwa

pembangunan suatu negara berhasil adalah Upaya untuk meratakan pembangunan adalah sebuah tugas yang kompleks, mengingat berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Meskipun tidak mudah, namun penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek agar pemerataan ini berhasil dilaksanakan. Akibatnya, hasil pembangunan kadang-kadang masih dianggap tidak merata dan menimbulkan perbedaan di antara wilayah.

Keberhasilan suatu wilayah dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap wilayah menetapkan target ambisius dalam perencanaan dan pembangunannya. Sederhananya, perubahan tahunan dalam Produk Domestik Bruto Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto di tingkat daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian mengatakan bahwa berkembang terjadi ketika tingkat aktivitas ekonomi meningkat di atas tingkat sebelumnya. Secara teoritis, kualitas kesejahteraan masyarakat berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan mereka.

Dalam konteks pemerataan pembangunan, penting untuk mengidentifikasi daerah-daerah atau kelompok-kelompok yang masih tertinggal dan memberikan perhatian khusus serta sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat perkembangan mereka. Dengan melakukan ini, tujuan keadilan dan kemakmuran yang merata dalam masyarakat dapat tercapai lebih baik. pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan adalah upaya jangka panjang yang memerlukan kesinambungan, komitmen, dan koordinasi yang baik di semua tingkatan pemerintahan dan pelaku-pelaku pembangunan.

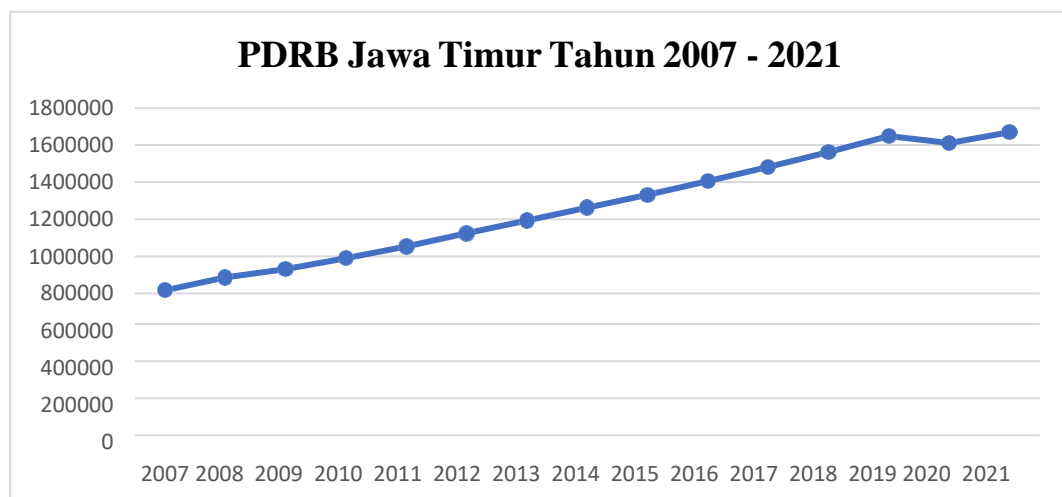
Menurut (Arsyad, 2010) menyatakan bahwa pandangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis akan membantu mengatasi masalah kemiskinan, seperti yang dijelaskan dalam "Trickle Down Effect" atau efek cucuran kebawah, telah menjadi bahan perdebatan dalam ekonomi dan pembangunan sosial. Konsep ini berpendapat bahwa ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor-sektor yang berkembang akan secara bertahap menyebar ke seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin, dan akhirnya membantu mengangkat taraf hidup mereka. Namun, dalam praktiknya, efek cucuran kebawah ini sering kali tidak begitu efektif seperti yang diharapkan.

Laju pertumbuhan yang meningkat dan tujuan pembangunan suatu wilayah adalah indikator keberhasilan pembangunan. Kelangsungan ekonomi sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Ini dapat dicapai jika ada peningkatan tahunan dalam output barang dan jasa atau PDRB. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi makro didefinisikan sebagai PDB, yang juga berarti perubahan nasional.(Tambunan, 2001).

Tidak terlepas dari perbedaan pendapatan, Jawa Timur adalah salah satu provinsi Indonesia. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota, memiliki banyak masalah yang perlu ditangani, termasuk disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika berbicara tentang rencana dan tujuan pembangunan nasional Indonesia, fokus pada pemerataan hasil pendapatan menjadi aspek yang paling krusial untuk dipantau. Pemerataan pendapatan menjadi elemen utama yang perlu diawasi dalam rangka mencapai kesetaraan. Dengan efektif memaksimalkan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam setiap wilayah, upaya pembangunan di daerah tersebut dapat ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan

ekonomi yang merata. Untuk mengilustrasikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, pengujian dengan menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dapat dianggap sebagai indikator; semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita di tiap kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 1. 1 PDRB Di Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2007–2020 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Bahwa dari data diatas menunjukkan pendapatan dan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2007 – 2021, pada tahun 2007 dengan nilai 817436,21 Milyar Rupiah, mengalami kenaikan ke tahun berikutnya yaitu pada tahun 2008 dengan nilai 8868005,88 Milyar Rupiah, dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2014 dengan nilai 1262684,5 Milyar Rupiah hingga tahun 2019 dengan nilai 1649895,64 Milyar Rupiah. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh pandemic yang melanda dunia termasuk di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur dengan nilai 1611507,78 Milyar Rupiah.

Selisih tinggi rendahnya PDRB yang dimiliki setiap Kabupaten / Kota mencetuskan terjadinya ketidak merataan. Hal ini diindikasikan pada permasalahan disparitas pendapatan antar Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur. Terdapat beberapa faktor utama penyebab terjadinya disparitas pendapatan yaitu sebagai berikut :

1. Perbedaan sumber daya alam antar daerah
2. Alokasi investasi
3. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah
4. Tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah.

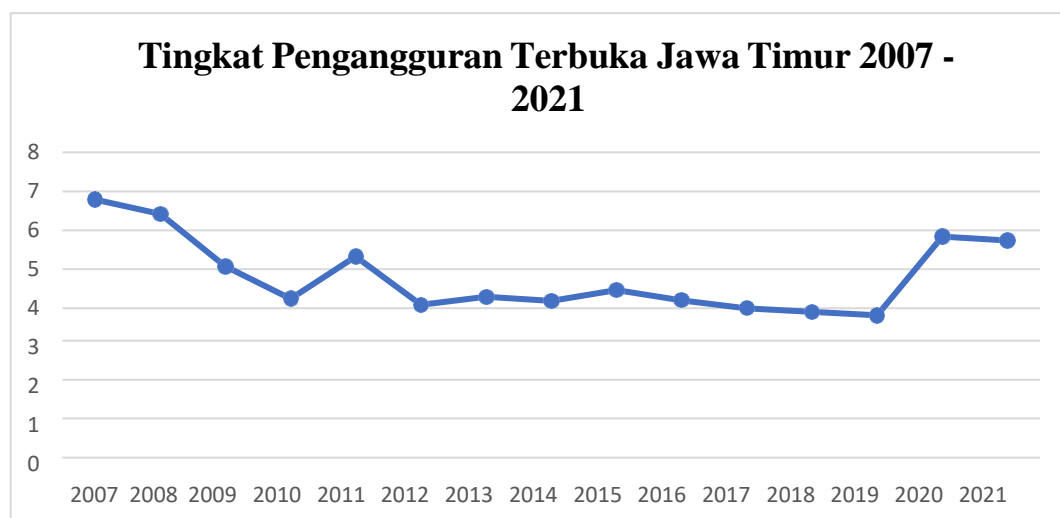
Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda, beberapa mengalami pertumbuhan yang positif dan yang lain mengalami pertumbuhan yang negatif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan perbedaan nilai PDRB di antara wilayah menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum merasakan pemerataan pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi. Besarnya PDRB di Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan perbedaan nilai PDRB antar kabupaten dan kota, seperti yang ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap PDRB total di masing-masing Provinsi Jawa Timur setiap tahun. Ini mengakibatkan upah yang diterima oleh buruh dan pekerja kelas rendah menjadi lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja atau menganggur. Situasi ini menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan semakin meningkat di wilayah Jawa Timur.

Menurut Hirschman dalam (Kuncoro, 2004) Karena aktivitas perekonomian yang mengalami hambatan, pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya terhambat. Fenomena ini mengakibatkan disparitas dalam perkembangan antar daerah,

menghambat pencapaian sasaran pemerataan pembangunan. Kekayaan alam seharusnya meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi keutamaan yang dimiliki dapat berdampak luas. Kekayaan alam tidak tersebar secara merata di seluruh Indonesia, yang menyebabkan disparitas pendapatan.

Pembangunan ekonomi pastinya juga harus diimbangi dengan jumlah kenaikan PDRB di suatu wilayah jika pertumbuhan ekonomi dalam PDRB mengalami penurunan maka masyarakat tidak mendapatkan pendapatan sehingga berdampak dalam kehidupan serta terjadinya pengangguran. Namun di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat PDRB dan indeks gini yang tinggi masih dibayangi oleh tingkat pengangguran terbuka pula. Banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat dan tidak seimbang dengan pekerjaan yang didapat maka menimbulkan tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah atau daerah tersebut.

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2021

Tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur juga masih di pengaruhi oleh tinggi rendahnya PDRB di suatu wilayah / daerah. Pada gambar 2 1.2 dapat dilihat, Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2007 –

2021 terjadi fluktuatif yang dimana mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan sejumlah 6,79 persen dan tahun 2008 - 2010 mengalami penurunan pada tingkat pengangguran terbuka, tetapi sempat mengalami kenaikan lagi pada tahun 2011 sebesar 5,33 persen. Selanjutnya pada tahun 2012 hingga tahun 2019 mengalami penurunan untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 5,84 persen karena adanya pandemi covid yang mengakibatkan banyak para pekerja yang harus menerima PHK dan banyak pekerja yang menganggur serta tidak mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan sehingga mengalami kelonjakan lagi untuk tingkat pengangguran terbuka

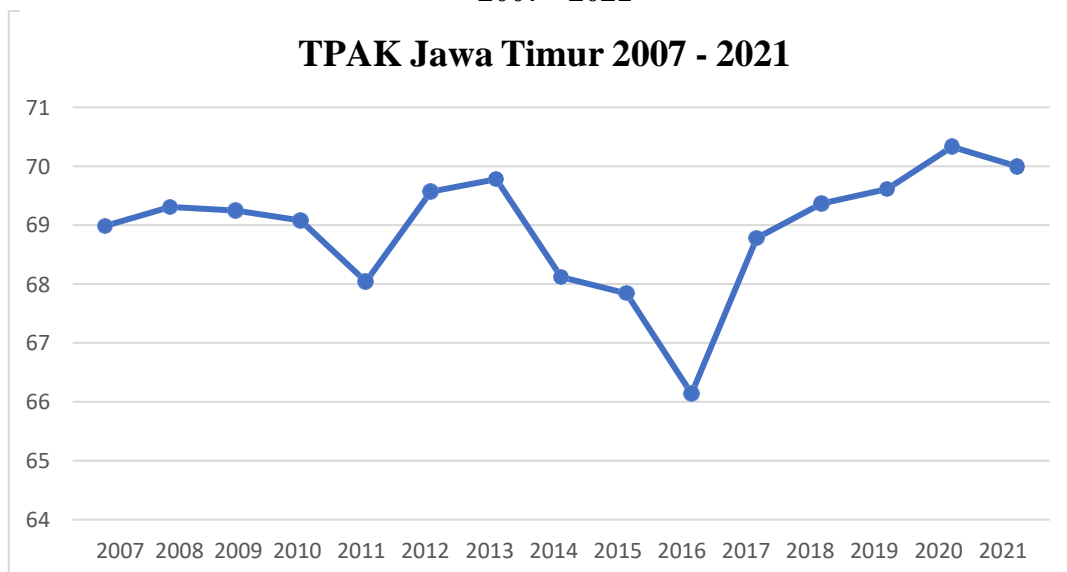
Mengukur kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan melalui penilaian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka karena indikator tersebut berkaitan dengan upaya menjaga distribusi pendapatan yang merata di antara anggota masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih berada pada tingkat yang rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan kapasitas ekonomi dalam menciptakan peluang kerja untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi angka tingkat pengangguran terbuka, semakin banyak individu yang belum berhasil mendapatkan pekerjaan.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2021) Tingkat pengangguran terbuka dinyatakan sebagai proporsi jumlah individu yang mencari pekerjaan aktif dalam populasi angkatan kerja, dibandingkan dengan jumlah individu yang saat ini tidak bekerja. Situasi ini terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang melambat, mengakibatkan banyak individu kesulitan dalam mencari pekerjaan yang memadai

dan tidak memperoleh penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Selain itu, kesiapan tenaga kerja masih bervariasi, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai jika tingkat pengangguran terbuka rendah.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan populasi terbesar. Pembangunan ekonomi yang direncanakan tidak selalu berhasil dengan populasi yang tinggi, tetapi juga dapat menyebabkan masalah dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk tetapi tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan. Apabila situasi ini terwujud, tidak semua anggota penduduk dalam usia produktif akan mampu mendapatkan pekerjaan karena ketergantungan pada ketersediaan peluang kerja. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan kompetisi yang cukup ketat dalam mencari pekerjaan.

Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 - 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2021

Dalam gambar diatas menunjukkan presentase tingkat pasrtisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2021 yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 – 2010 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami

kestabilan hingga mencapai 69,08% selanjutnya pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 68,04%. Di tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup parah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,14% tetapi pada tahun berikutnya 2017 – 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja Kembali naik hingga menjadi 70,00%. Semakin tinggi TPAK, semakin banyak lapangan kerja yang harus dipenuhi (Rosa & Sovita, 2016). Angka pengangguran terbuka dalam suatu wilayah mencerminkan situasi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Jika tingkat pengangguran tinggi di wilayah tertentu, berarti sumber daya tenaga kerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendorong perkembangan ekonomi. Berkurangnya TPAK dan PDRB di suatu wilayah akan mengurangi kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan disparitas pendapatan yang lebih besar.

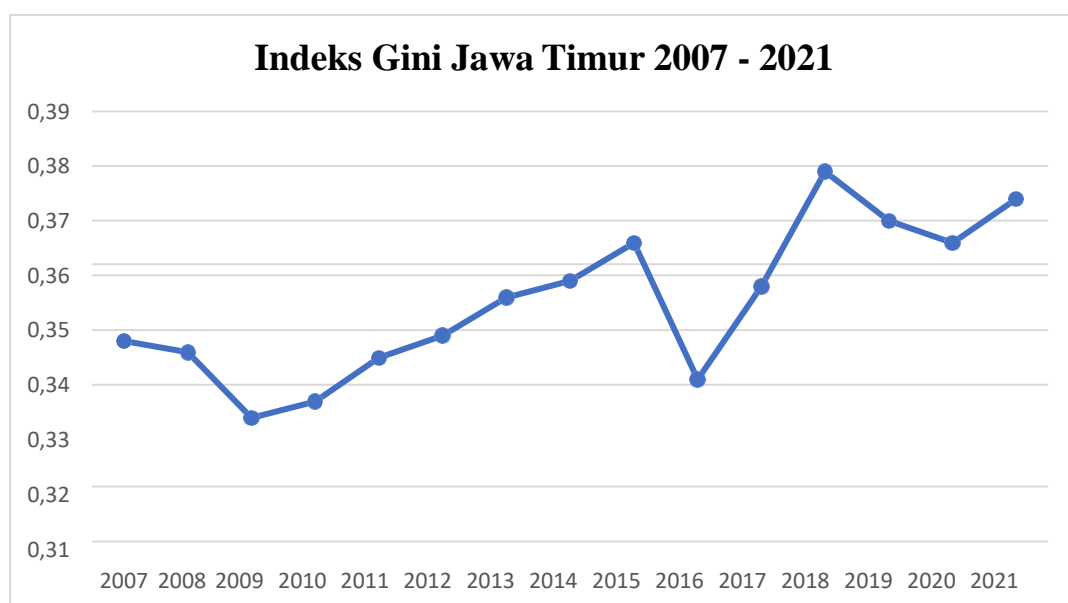
Dengan berbagai alasan, ketenagakerjaan jauh lebih serius daripada hanya kekurangan lapangan kerja, peluang kerja, dan produktivitas yang rendah. Angka pengangguran, yang sebagian besar disebabkan oleh “terbatasnya permintaan”, terus meningkat seiring perubahan dalam kawasan makro ekonomi mayoritas negara berkembang. Faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti peningkatan utang luar negeri, kondisi pembayaran yang menyusut, dan kebijakan lainnya, semakin berhubungan satu sama lain dan menyebabkan ketidakpastian dalam tingkat upah dan penyediaan lapangan pekerjaan.. (Todaro, 2000).

Indeks Gini adalah alat yang digunakan oleh Badan Pusat Statistika untuk mengidentifikasi perbedaan atau ketimpangan dalam pendapatan antarmasyarakat. Nilai indeks gini harus berada di antara 0 dan 1 dan menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antara masyarakat semakin rendah atau rata. Sebaliknya, jika nilai

indeks gini mendekati angka 1 maka perbedaan pendapatan antara masyarakat semakin besar (melebar).

Menurut (Lestari, 2019) Disparitas pendapatan, yang juga sering disebut sebagai ketimpangan pendapatan, merujuk pada ketidakseimbangan dalam pembagian total pendapatan nasional di antara berbagai rumah tangga di seluruh negara. Dengan istilah lain, ketidaksetaraan pendapatan mengacu pada disparitas jumlah pendapatan yang diterima oleh individu-individu dalam masyarakat yang berbeda, sehingga menghasilkan perbandingan yang signifikan antara pendapatan individu yang tinggi dan rendah

Gambar 1. 4 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 - 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2021

Dalam gambar diatas menunjukkan adanya presentase indeks gini di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 – 2021 yang mengalami fluktuasi. Di tahun 2007 – 2015 mengalami kestabilan dalam presentase indeks gini tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,334 persen. Dilanjutkan dengan tahun berikutnya pada tahun 2016 mengalami penyusutan sebesar 0,341 persen, tidak

hanya itu indeks gini juga mengalami pertambahan juga pada tahun 2018 sebesar 0,379 persen. Hal ini dapat dilihat bahwa di Provinsi Jawa Timur dalam permasalahan disparitas pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini masih terlihat tinggi, sehingga diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah yang lebih efektif dan dapat diterapkan untuk mengurangi disparitas pendapatan yang terjadi. Angka disparitas atau ketimpangan untuk negara dengan tingkat ketimpangan yang tajam berkisar 0,50 hingga 0,70 dan untuk negara dengan distribusi pendapatan yang baik .

Permasalahan Disparitas Pendapatan yang diabaikan secara terus menerus akan menimbulkan dampak yang membebani, yang memiliki efek negatif seperti dapat menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh negara dan mengganggu kestabilan perekonomian. Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas menginterpretasikan beberapa permasalahan Seberapa besar terjadinya disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021?

1. Apakah Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan keterbatasan kemampuan dari peneliti maka penelitian ini memuat batasan masalah agar peneliti bisa terfokus terhadap penelitian. Dalam penelitian ini menentukan bahwa permasalahan hanya meliputi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam Analisis Pengaruh Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur 2007 - 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam studi ini, diharapkan dapat menyajikan informasi tentang dampak ketidaksetaraan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi isu ketidaksetaraan tersebut. Diharapkan memberikan informasi tambahan bagi peneliti lain untuk memkasimalkan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan disparitas pendapatan dan bisa menurunkan permasalahan tingkat dipasritas pendapatan.